BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Analisis data dan diskusi mengenai dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dummy COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016 hingga 2023 dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dapat menghasilkan beberapa kesimpulan berikut:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat mendorong aktivitas pembangunan daerah. Ini sesuai dengan teori desentralisasi fiskal (Oates, 1999) yang menekankan peran kemandirian fiskal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
- 2. Dana Transfer berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa dana dari pemerintah pusat tetap menjadi sumber utama untuk mendukung pembangunan di Sumatera Barat. Ini sejalan dengan fenomena efek flypaper, di mana pengeluaran daerah lebih banyak didanai oleh dana transfer daripada oleh pendapatan asli daerah.
- 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, peningkatan standar hidup, pendidikan, dan kesehatan benar-benar berdampak pada produktivitas ekonomi daerah. Hasil ini sejalan dengan teori pertumbuhan neoklasik Solow-Swan yang menekankan pentingnya modal manusia.
- 4. Dummy COVID-19 memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak menurunkan pada ekonomi lokal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

- 1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskal dengan menggali potensi pajak daerah dan retribusi secara lebih inovatif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pemungutan pajak. Peningkatan PAD tidak hanya akan memperkuat kemandirian fiskal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
- 2. Dana transfer dari pusat harus diarahkan pada belanja pembangunan yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*), khususnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana transfer perlu dilakukan secara berkala agar tidak terjebak pada belanja rutin yang kurang produktif.
- 3. Pemerintah perlu memperkuat program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, seperti penyediaan akses pendidikan yang lebih merata, perbaikan layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Investasi pada manusia terbukti signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan harus menjadi prioritas pembangunan.
- 4. Pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya fleksibilitas kebijakan fiskal. Pemerintah perlu menyiapkan instrumen fiskal yang lebih responsif terhadap krisis, baik melalui transfer fiskal tambahan, jaring pengaman sosial, maupun program pemulihan ekonomi yang tepat sasaran. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah ketika menghadapi shock eksternal.
- 5. Studi ini dapat diperluas dengan menambahkan variabel lain seperti belanja modal, investasi, inflasi, tingkat pengangguran, serta indeks ketimpangan. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas periode pengamatan hingga setelah pandemi berakhir sepenuhnya, serta

mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang harus dicatat untuk menjadi pertimbangan dalam penelitian di masa depan. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan tersebut:

- 1. Variabel yang digunakan dalam studi ini terbatas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Dummy COVID-19. Padahal, pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti belanja modal pemerintah, investasi swasta, inflasi, tingkat pengangguran, serta ketimpangan pendapatan antar wilayah. Dengan hanya menggunakan variabel yang terbatas, penelitian ini belum mampu menangkap keseluruhan determinan pertumbuhan ekonomi secara komprehensif.
- 2. Periode penelitian hanya mencakup tahun 2016–2023. Rentang waktu ini memang cukup merepresentasikan kondisi sebelum pandemi, masa pandemi, hingga awal pemulihan. Namun, periode tersebut masih relatif pendek untuk menggambarkan dampak jangka panjang pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dinamika pemulihan ekonomi pasca pandemi yang berlangsung setelah 2023 belum bisa ditangkap dalam penelitian ini.
- 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Meskipun metode ini memberikan gambaran yang objektif dan terukur, penelitian ini belum mengkombinasikan analisis kualitatif. Padahal, faktor non-ekonomi seperti kebijakan politik, tata kelola pemerintahan, serta kapasitas kelembagaan daerah juga berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan hanya mengandalkan pendekatan kuantitatif, penelitian ini lebih menekankan pada hubungan statistik antar variabel, tanpa menggali secara mendalam konteks sosial-politik di baliknya.
- 4. Variabel dummy COVID-19 yang digunakan dalam penelitian ini hanya membedakan kondisi sebelum pandemi (nilai 0) dan sesudah pandemi

(nilai 1). Dengan demikian, dummy hanya mampu menangkap dampak pandemi secara biner, tanpa merepresentasikan perbedaan intensitas dampak antar tahun. Misalnya, dampak ekonomi pada tahun 2020 (kontraksi terdalam) tentu berbeda dengan 2021 atau 2022 ketika pemulihan mulai terjadi. Namun, perbedaan ini tidak dapat ditangkap secara detail dengan pendekatan dummy.

5.4 Implikasi Kebijakan

Temuan dari studi ini membawa beberapa dampak kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dan pusat ketika mereka merencanakan strategi untuk pengembangan ekonomi lokal:

1. Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah melalui Optimalisasi PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak positif yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus menjadi fokus utama dalam kebijakan. Pemerintah daerah perlu berinovasi dalam mengeksplorasi potensi pajak dan retribusi, meningkatkan tingkat kepatuhan dari para wajib pajak, serta menggunakan teknologi digital dalam sistem pemungutan. Dengan memperkuat kemandirian fiskal, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan lebih bebas dalam merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan setempat.

2. Efektivitas Pemanfaatan Dana Transfer.

Hasil studi menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menandakan bahwa transfer fiskal pusat tetap menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pusat harus memastikan bahwa dana transfer tidak hanya bersifat menutup defisit fiskal daerah, tetapi juga diarahkan pada belanja produktif. Pemerintah daerah pun dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana transfer agar benar-benar menghasilkan multiplier effect terhadap perekonomian lokal.

- 3. Pembangunan Manusia sebagai Prioritas Pembangunan Daerah. Signifikannya pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi memperkuat urgensi kebijakan pembangunan manusia. Pemerintah daerah perlu memfokuskan anggaran pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan neoklasik yang menekankan pentingnya modal manusia dalam mendorong produktivitas jangka panjang.
- 4. Ketahanan Fiskal dalam Menghadapi Krisis.

 Studi memperlihatkan bahwa dummy COVID-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa pandemi telah menekan kapasitas fiskal daerah dan memperlambat pertumbuhan. Implikasi kebijakannya adalah perlunya membangun ketahanan fiskal daerah agar mampu menghadapi shock eksternal di masa depan. Hal ini dapat diwujudkan melalui diversifikasi sumber penerimaan, manajemen belanja yang lebih efisien, serta penyediaan dana darurat

(fiscal buffer) yang dapat digunakan saat krisis.